



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 30 Maret 2021

Halaman: 5

Sanksi Menanti ASN Mudik Idulfitri

Pemkot Berupaya Putus Mata Rantai Penyebaran Virus

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta siap menjatuhkan sanksi tegas pada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekat mudik saat Idulfitri mendatang. Sebagai pegawai negeri, mereka dituntut memberikan teladan bagi warga masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menegaskan, sejauh ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), maupun Inspektorat, untuk membahas perihal sanksi tersebut. Hanya saja, ia meminta supaya sanksi yang diterapkan selaras aturan.

"Sanksi administratif, sanksi yang sudah ada ketentuannya. Semua berdasar aturan yang ada. Saya sudah minta kepada BKPP dan Inspektorat, untuk sanksinya itu, ya harus sesuai dengan aturan," terangnya, Senin (29/3).

"Jadi, jangan sampai kemudian bikin sanksi sendiri. Nanti sanksinya aneh-aneh, entah disuruh *push-up*, atau disuruh apa, ya nggaklah, semuanya kan tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku," imbuh Haryadi.

Namun demikian, ia meyakini, ASN di lingkungan Pemkot Yogyakarta dapat memahami dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat tersebut. Sebab, aturan ini diterapkan demi mengantisipasi dan memutus sebaran Covid-19 yang kini semakin berkepanjangan.

"Saya yakin dan percaya, saya husnuzan, bahwa ASN di Kota dapat mema-

TINDAK TEGAS

- Pemkot akan beri sanksi tegas pada setiap ASN yang nekat mudik saat Idulfitri.
- Sanksi administratif berdasarkan aturan yang ada.
- Upaya ini diterapkan untuk mengantisipasi dan memutus sebaran Covid-19.
- Pemkot siap melaksanakan aturan pemerintah pusat.

hami dan mengikuti aturan itu. Karena kita semua tentu tidak ingin sakit, maupun menularkan penyakit. Belum tentu loh, dari Yogya pergi ke sana nggak bawa virus, begitu juga sebaliknya," tandas Wali Kota.

Orang nomor satu di kota pelajar itu pun beranggapan, meski mudik dilarang, bukan berarti aktivitas-aktivitas sosial lantas terhenti. Sebab, tambah Haryadi, pada hakekatnya, larangan mudik hanyalah upaya untuk mengurangi laju masyarakat untuk bepergian, atau menekan mobilitas.

"Saya rasa ASN kita sudah cukup dewasa. Artinya, pasti bisa mengikuti aturan-aturan itu. Jangan sampai dilanggar. Kalau (pemerintah pusat) melarang mudik, berarti ada mobilitas yang harus dikurangi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Haryadi juga berharap agar masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut. Sehingga, tidak muncul aturan-aturan yang malah

memberatkan warganya sendiri, seperti menutup akses keluar masuk, atau disebutnya *lockdown*, dan lain sebagainya.

"Kan sekarang sudah ada PPKM. Memang, yang dibatasi tidak hanya yang keluar, tapi juga yang masuk. Hanya saja, jangan terus membikin aturan-aturan sendiri yang nanti malah menyulitkan warganya," tegasnya.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu aturan lengkap dari pemerintah pusat terkait pelarangan mudik bagi semua kalangan ini. Jika memang diterapkan pembatasan, Pemkot siap mengkondisikan sebaik mungkin.

"Apa saja yang nanti diatur, tentu akan kita kondisikan. Ya, apakah akan ada pengetatan seperti lebaran tahun lalu, kita akan lakukan, mulai dari RT dan RW. Mungkin PPKM juga kita jalankan lagi. Tapi, untuk sekarang, kita belum tahu pola kebijakannya seperti apa," tegas Heroe.

Penggunaan GeNose

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional memutuskan untuk memperluas penggunaan GeNose C19 pada seluruh moda transportasi. Keputusan itu termaktub dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Covid-19.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadamanta Baskara Aji, menuturkan, Penda DIY akan mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Nasional. Menurutnya, pemberlakuan SE tersebut dianggap perlu untuk menekan laju penularan Covid-19 akibat meningkatnya potensi mobilitas warga saat libur Lebaran 2021 nanti.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005